



PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN

Annisaul Mardhiyah, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine whether the financial performance of the central government as an independent variable, proxied by solvency ratios, revenue effectiveness, revenue growth, and expenditure growth, affects the accountability of financial reporting, which is proxied by the BPK's opinion as a dependent variable. The BPK's opinion consists of Unqualified Opinion (WTP), Qualified Opinion (WDP), Adverse Opinion (TW), and Disclaimer of Opinion (TMP).

The data analyzed are government financial statements, specifically the audited financial statements of central ministries for the years 2017-2021. The research data consists of secondary data obtained by downloading from the BPK RI website. The population of this research consists of 34 financial statements of state ministries that have been audited by the BPK and their audit reports. The sample in this study uses the entire sample of 170. Data analysis used multiple linear regression analysis.

The research results show that the government's financial performance in terms of solvency, revenue effectiveness, and expenditure growth does not affect the accountability of financial reporting. For financial performance in the form of revenue growth, it has an impact on the accountability of financial reporting.

Keywords: *financial performance, financial ratios, accountability, audit opinion, central government.*

PENDAHULUAN

Layanan untuk publik diberikan dari berbagai organisasi sektor publik, termasuk lembaga tinggi negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan kementerian. Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi umum, dan penyediaan kebutuhan umum adalah beberapa contoh layanan publik.

Belinda dan Costari (2021) menyatakan bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi yang dikelola oleh pemerintah yang beroperasi untuk melaksanakan tugas pemerintah yang baik di lingkungan pelaksanaan pusat dan daerah. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pemerintah atau organisasi sektor publik membutuhkan pembiayaan untuk memberikan pelayanan terhadap publik yang bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dalam mengelola pembiayaan organisasi sektor publik harus efektif dan memprioritaskan pembiayaan yang harus disesuaikan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.

Retnowati (2020) memaparkan bahwa organisasi sektor publik mendapat banyak tantangan ketika terjadi pandemi covid-19. Sektor perekonomian dan pelayanan publik terdampak cukup berat. Dampak di bidang perekonomian membuat kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara mendapat tekanan cukup tinggi.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik yang berisi rencana kegiatan digambarkan dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja dalam

¹ Corresponding author

satuan moneter. Dalam pengelolaan anggaran di instansi pemerintah diterapkan sistem akuntabilitas yang memengaruhi instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Andayani dan Azizah (2022), Pemerintah pusat, daerah dan lembaga publik lainnya diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan secara berkala. Dalam keuangan, semua operasi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik harus bersifat transparan karena dalam organisasi sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitas. Fitri dan Khotimah (2022) menyatakan bahwa salah satu penilaian akuntabilitas adalah opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang kewajaran atas laporan keuangan pemerintah. Opini yang dikeluarkan oleh BPK terdapat 4 jenis yaitu opini wajar tanpa pengecualian; wajar dengan pengecualian; tidak wajar; tidak mengeluarkan pendapat.

Menurut laporan BPK-RI pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, opini yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi covid-19, pemerintah pusat khususnya kementerian negara mendapat penurunan dalam memberikan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK. Berdasarkan hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi masalah dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah pusat atas laporan keuangan.

Menurut Herindraningrum dan Yuhertiana (2021), Pemerintah pusat harus mencapai opini audit terbaik yang dikeluarkan oleh BPK. Opini audit terbaik tersebut berupa penilaian wajar tanpa pengecualian atau disingkat WTP. Akbar dan Djazuli (2015) menjelaskan bahwa opini audit wajar tanpa pengecualian menunjukkan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut bersifat wajar dan berisikan informasi keuangan yang akurat serta dapat diandalkan.

Menurut Ariyadi, *et al.* (2019), Laporan keuangan pemerintah pusat dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas. Auditor diperlukan dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Di Indonesia, auditor yang diperlukan untuk menilai akuntabilitas publik adalah Badan Pemeriksa Keuangan, juga dikenal sebagai BPK. Tugas BPK adalah menilai akuntabilitas atas laporan keuangan, terutama yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hasil pekerjaan badan pemeriksa keuangan berupa opini atau pendapat terhadap laporan keuangan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori agensi (teori keagenan)

Soemarso (2018) menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang mendasari manajemen perusahaan, organisasi, dan pemerintah. Teori ini membahas hubungan antara prinsipal dan agen yang masing-masing berfungsi sebagai pemilik dan manajemen. Secara khusus, teori keagenan membahas hubungan keagenan di mana salah satu pihak (prinsipal) mendelegasikan pekerjaannya kepada pihak lain (agen).

Menurut Mardiasmo (2018), Teori agensi digunakan sebagai dasar dibangunnya organisasi sektor publik. Hubungan keagenan dalam organisasi sektor publik yaitu hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah atau kementerian sebagai agen sedangkan masyarakat sebagai prinsipal yang diwakili oleh DPR. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan menyajikan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat sebagai prinsipal.

Pada hubungan keagenan akan timbul adanya informasi asimetri antara agen dan prinsipal. Adanya informasi asimetri tersebut dapat menimbulkan penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai agen. Dengan itu, dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat perhatian khusus dan perlu diawasi oleh pemangku kepentingan.

Akuntabilitas pelaporan keuangan

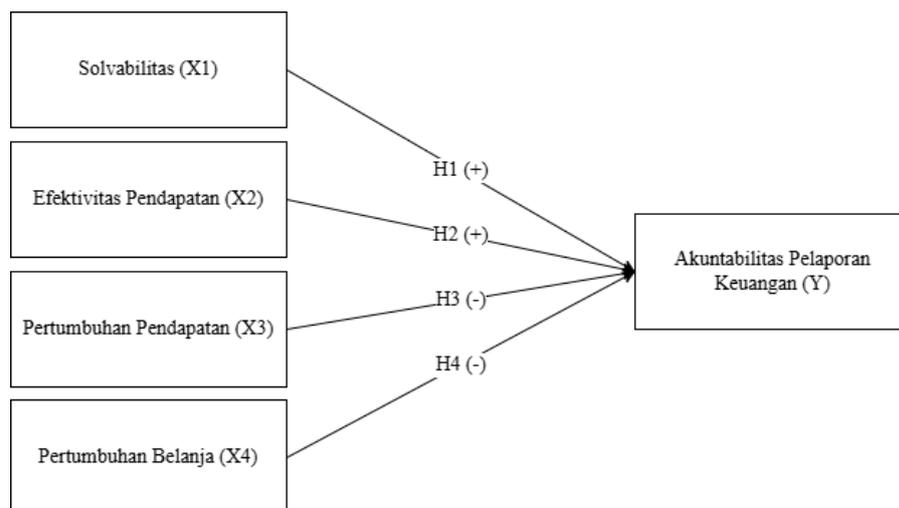
Menurut Government Accounting Standards Board (GASB) dalam konsep pernyataan nomor 1 tentang tujuan pelaporan keuangan pemerintahan, Akuntabilitas adalah dasar pelaporan keuangan pemerintahan dan merupakan tujuan tertingginya. Konsep pernyataan nomor 1 menekankan pengguna harus dapat menggunakan hasil pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

BPK merupakan badan yang memeriksa keuangan instansi-instansi pemerintah ataupun pejabat negara. Hasil audit BPK digunakan sebagai indikator untuk mengetahui terjadinya penyelewengan dalam penggunaan APBN. Hasil audit BPK RI berupa opini pemeriksaan yang terdiri dari WTP (wajar tanpa pengecualian), WDP (wajar dengan pengecualian), TW (tidak wajar), TMP (tidak mengeluarkan pendapat). Opini pemeriksaan tersebut sangat penting untuk masyarakat karena digunakan sebagai indikator penilaian kinerja pengelolaan keuangan negara.

Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian berupa variabel independen dan dependen dalam bentuk skema.

Gambar 2. 1 Model penelitian



Perumusan hipotesis

Pengaruh variabel solvabilitas terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021.

Solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar hutang atau tagihan jangka panjang. Untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas, kementerian dapat menghadapi masalah karena pengelolaan keuangan yang tidak transparan sehingga memperburuk solvabilitas, terutama jika ada ketidakefisienan dalam penggunaan dana.

Berdasarkan teori keagenan, yang menjelaskan bagaimana tugas diberikan kepada agen oleh prinsipal dan kemudian agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Jika terdapat asimetri informasi dalam pendelegasian tugas maka dapat memengaruhi akuntabilitas. Laporan keuangan disampaikan kepada masyarakat sebagai prinsipal oleh organisasi sektor publik tentang kinerja keuangan mereka.



Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Meliyana Fitri dan Husnul Khotimah (2022) menyatakan bahwa variabel solvabilitas tidak memengaruhi variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Dari penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.*

Pengaruh variabel efektivitas pendapatan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021.

Kinerja keuangan pemerintah dievaluasi melalui pendekatan *value for money*. Pengukuran efisiensi, efektivitas, dan ekonomi digunakan untuk melakukan pengukuran ini. Jika suatu kementerian mengalami kebocoran anggaran atau korupsi, hal itu dapat disebabkan oleh kekurangan sistem pengawasan yang kuat atau masalah dengan praktik korupsi sehingga menyebabkan pendapatan tidak digunakan secara efektif.

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah ditugaskan untuk menjalankan fungsinya sebagai agen dan bertanggung jawab atas kinerja keuangannya kepada masyarakat. Penyimpangan dalam proses pertanggungjawaban, seperti pelanggaran moral, dapat berdampak pada akuntabilitas.

Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Meliyana Fitri dan Husnul Khotimah (2022), menyatakan bahwa variabel efektivitas pendapatan tidak memengaruhi variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Dari penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Rasio efektivitas pendapatan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.*

Pengaruh variabel pertumbuhan pendapatan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021.

Pengukuran rasio pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara komponen penerimaan, sehingga bisa menentukan potensi yang harus diprioritaskan. Pertumbuhan pendapatan dalam kementerian merupakan faktor penting untuk memastikan keberlanjutan operasional dan program yang dijalankan. Namun jika terjadi perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga dapat memengaruhi pendapatan kementerian terutama yang bergantung pada pajak, ekspor, atau bantuan internasional.

Berdasarkan teori keagenan, dimana membahas tentang pendelegasian tugas dan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dalam mempertanggungjawabkan kinerja tersebut dilakukan pengukuran untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah yang telah didelegasikan tugas dari masyarakat sebagai prinsipal. Jika dalam melaksanakan tugasnya terdapat asimetri informasi maka dapat memengaruhi akuntabilitas. Dari penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: *Rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.*

Pengaruh variabel pertumbuhan belanja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021.

Pengukuran rasio pertumbuhan belanja untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara komponen pengeluaran, sehingga dapat digunakan untuk menentukan potensi mana yang harus mendapatkan perhatian lebih besar. Pertumbuhan belanja dalam kementerian



dapat menjadi tantangan besar jika tidak dikelola dengan baik. Permasalahan yang dapat terjadi berupa pemborosan dan korupsi, dimana masalah tata kelola yang buruk dapat menyebabkan belanja yang tidak terkendali akibat praktik korupsi atau pengadaan yang tidak efisien.

Berdasarkan teori keagenan, dimana membahas pendelegasian tugas dan kemudian dilakukan pertanggungjawaban atas kinerjanya. Dalam mempertanggungjawabkan kinerja tersebut dilakukan pengukuran menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengetahui kinerja keuangannya. Jika dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangan terjadi praktik moral hazard maka dapat memengaruhi akuntabilitas. Dari penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: *Rasio pertumbuhan belanja berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan tahapan penelitian dari variabel yang digunakan, pengukurannya, populasi beserta sampel dan model penelitian.

Variabel penelitian

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas pelaporan keuangan. Variabel dependen berupa opini BPK RI atas laporan keuangan yang terdiri dari jenis opini WTP, WDP, TW, TMP.

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan. Variabel kinerja keuangan akan dianalisis menggunakan empat pengukuran kinerja keuangan berupa analisis rasio keuangan berupa rasio solvabilitas, rasio efektivitas pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja.

Tabel 1
Variabel dependen dan independen serta pengukurannya

Variabel	Pengukuran
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Opini audit BPK RI: WTP = 4, WDP = 3, TW = 2 TMP = 1
Kinerja Keuangan	Solvabilitas (total kewajiban / total aset) x 100%
	Efektivitas pendapatan (realisasi pendapatan / anggaran pendapatan) x 100%
	Pertumbuhan pendapatan $((Pt-Po)/Po) \times 100\%$
	Pertumbuhan belanja $((Bt-Bo)/Bo) \times 100\%$

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2017-2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel terdiri dari kementerian yang mengeluarkan laporan keuangan audited secara lengkap tahun 2017-2021 dan kementerian yang mendapatkan opini dari BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu total keseluruhan sampel tanpa adanya uji outlier, karena bertujuan untuk menunjukkan hasil perhitungan yang menggambarkan kondisi sesungguhnya atas populasi penelitian. Data yang digunakan yaitu data kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari *website* dan dokumentasi arsip-arsip Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan sumber lainnya yang terkait.

Model penelitian

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program STATA versi 14.2. Adapun persamaan regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \text{Cons} + \dots X_1 + \dots X_2 + \dots X_3 + \dots X_4 + \text{Error}$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

X1 = Rasio Solvabilitas

X2 = Rasio Efektivitas Pendapatan

X3 = Rasio Pertumbuhan Pendapatan

X4 = Rasio Pertumbuhan Belanja

E = Error

Cons = Konstanta

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
OpiniAudit	170	3.935294	.3104514	1	4
Solvabilitas	170	-2.438662	2.06716	-7.062945	3.455065
Efektivita-n	170	-.0182961	2.956041	-7.062945	11.62252
Pertumbuha-n	170	-.8610562	2.225381	-6.025646	5.250244
Pertumbuha-a	170	-1.413039	2.224893	-6.349332	5.029849

Sumber: Stata 14.2

Hasil statistik deskriptif berupa opini audit dengan rata-rata sebesar 3,935294. Hasil statistik deskriptif berupa solvabilitas dengan rata-rata sebesar -2,438662. Hasil statistik deskriptif berupa efektivitas pendapatan dengan rata-rata sebesar -,0182961. Hasil statistik deskriptif berupa pertumbuhan pendapatan sebesar -,8610562. Hasil statistik deskriptif berupa pertumbuhan belanja sebesar -1,413039.

Hasil statistik deskriptif berupa opini audit dengan standar deviasi sebesar ,3104514. Hasil statistik deskriptif berupa solvabilitas dengan standar deviasi sebesar 2,06716. Hasil statistik deskriptif berupa efektivitas pendapat dengan standar deviasi sebesar 2,956041. Hasil statistik deskriptif berupa pertumbuhan pendapatan dengan standar deviasi sebesar 2,225381. Hasil statistik deskriptif berupa pertumbuhan belanja dengan standar deviasi sebesar 2,224893.

Hasil statistik deskriptif nilai minimum dalam opini audit sebesar 1 dan maksimum sebesar 4. Nilai minimum dalam variabel solvabilitas sebesar -7,062945 dan maksimum sebesar 3,455065. Nilai minimum dalam variabel efektivitas pendapatan sebesar -7,062945 dan maksimum sebesar 11,62252. Nilai minimum dalam variabel pertumbuhan pendapatan sebesar -6,025646 dan maksimum sebesar 5,250244. Nilai minimum dalam variabel pertumbuhan belanja sebesar -6,349332 dan maksimum sebesar 5,029849.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Analisis regresi linear perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis. Dengan itu harus dilakukan pengujian terhadap empat asumsi klasik seperti: uji normalitas; uji multikolinearitas; uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
Solvabilitas	170	0.99194	1.045	0.100	0.46001
Efektivita-n	170	0.98923	1.396	0.761	0.22329
Pertumbuha-n	170	0.99366	0.821	-0.450	0.67359
Pertumbuha-a	170	0.99416	0.757	-0.634	0.73705

Sumber: Stata 14.2

Dari hasil uji normalitas dinyatakan bahwa variabel independen berupa solvabilitas memiliki nilai prob>z sebesar 0,46001. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel solvabilitas terdistribusi normal dengan hasil prob>z diatas 0,05. Variabel efektivitas pendapatan memiliki nilai prob>z sebesar 0,22329. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel efektivitas pendapatan terdistribusi normal dengan hasil prob>z diatas 0,05. Variabel pertumbuhan pendapatan memiliki nilai prob>z sebesar 0,67359. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel pertumbuhan pendapatan terdistribusi normal dengan hasil prob>z diatas 0,05. Variabel pertumbuhan belanja memiliki nilai prob>z sebesar 0,73705. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel pertumbuhan belanja terdistribusi normal dengan hasil prob>z diatas 0,05.

Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
Solvabilitas	5.78	0.173069
Pertumbuhan Pertumbuhan	5.48	0.182550
Pertumbuhan Efektivitas	3.52	0.284061
Mean VIF	4.26	

Sumber: Stata 14.2

Hasil uji multikolinearitas variabel solvabilitas dinyatakan bahwa nilai VIF sebesar 5,78 dengan nilai tolerance sebesar 0,173069. Hasil uji multikolinearitas variabel efektivitas pendapatan dinyatakan bahwa nilai VIF sebesar 2,25 dengan nilai tolerance sebesar 0,444914. Hasil uji multikolinearitas variabel pertumbuhan pendapatan dinyatakan bahwa nilai VIF sebesar 3,52 dengan nilai tolerance 0,284061. Hasil uji multikolinearitas variabel pertumbuhan belanja dinyatakan bahwa nilai VIF sebesar 5,48 dengan nilai tolerance sebesar 0,182550. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel solvabilitas, efektivitas pendapatan, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja.

Uji heteroskedastisitas

```
White's test for Ho: homoskedasticity  
against Ha: unrestricted heteroskedasticity  
  
chi2(14) = 9.60  
Prob > chi2 = 0.7906
```

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Source	chi2	df	p
Heteroskedasticity	9.60	14	0.7906
Skewness	4.25	4	0.3729
Kurtosis	1.15	1	0.2825
Total	15.01	19	0.7220

Sumber: Stata 14.2

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *white test* dinyatakan bahwa H0 adalah homoskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas dinyatakan data tersebar secara merata dengan prob>chi2 sebesar 0,7906 yang lebih besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel kinerja keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Uji F

Digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	170
Model	1.05104533	4	.262761333	F(4, 165)	=	2.85
Residual	15.23719	165	.092346606	Prob > F	=	0.0258
				R-squared	=	0.0645
				Adj R-squared	=	0.0418
				Root MSE	=	.30389
Total	16.2882353	169	.09638009			

OpiniAudit	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Solvabilitas	.0514093	.0271821	1.89	0.060	-.0022602	.1050789
EfektivitasPendapatan	-.0088837	.0118555	-0.75	0.455	-.0322916	.0145243
PertumbuhanPendapatan	-.057056	.0197087	-2.89	0.004	-.0959697	-.0181423
PertumbuhanBelanja	-.0015028	.0245905	-0.06	0.951	-.0500554	.0470498
_cons	4.00925	.0515266	77.81	0.000	3.907513	4.110986

Sumber: Stata 14.2

Berdasarkan hasil pengujian diatas uji F $0,0258 < 0,05$ artinya simultan, variabel independen kinerja keuangan yang terdiri dari solvabilitas, efektivitas pendapatan, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja mengetahui seberapa besar kemampuan menjelaskan variabel dependen akuntabilitas pelaporan keuangan (opini audit) secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan nilai yang sudah dihitung menggunakan regresi model pls (pooled least squared) dan didapatkan R-Squared sebesar 0,0645 atau 6,45%. Maka, dapat dikatakan jika variabel solvabilitas, efektivitas pendapatan, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja mampu menjelaskan variabel akuntabilitas pelaporan keuangan sebesar 6,45%. Sisanya yaitu sebesar 93,55% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian. Hasil uji model yaitu Uji F $< 0,05$ menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian dinyatakan mampu memenuhi *goodness of fit*.

Hasil Uji t Parsial

Hasil uji t parsial ($P>|t|$) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan dependen secara parsial. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda bahwa: 1) variabel solvabilitas memiliki nilai sebesar 0,060 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jadi, variabel solvabilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. 2) variabel efektivitas pendapatan memiliki nilai sebesar 0,455 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jadi, variabel efektivitas pendapatan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. 3) variabel pertumbuhan pendapatan memiliki nilai sebesar 0,004 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi

sebesar 0,05. Jadi, variabel pertumbuhan pendapatan berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. 4) variabel pertumbuhan belanja memiliki nilai 0,951 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jadi, pertumbuhan belanja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pembahasan

Hipotesis	Hubungan	Hasil	Keterangan
H1	Rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan	Tidak berpengaruh	Tidak terbukti dan tolak hipotesis
H2	Rasio efektivitas pendapatan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan	Tidak berpengaruh	Tidak terbukti dan tolak hipotesis
H3	Rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan	Berpengaruh negatif	Terbukti dan terima hipotesis
H4	Rasio pertumbuhan belanja berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan	Tidak berpengaruh	Tidak terbukti dan tolak hipotesis

Sumber: Disusun oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, pengujian hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hal ini mengacu pada hasil uji t yang menunjukkan bahwa **rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan**. Hasil uji t menyatakan bahwa tingkat signifikansi variabel solvailitas sebesar 0,060 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meliyana Fitri dan Husnul Khotimah (2022) menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan, dan sejalan dengan penelitian Sujatmiko Wibowo menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK.

Pengujian hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hal ini mengacu pada hasil uji t yang menunjukkan bahwa **rasio efektivitas pendapatan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan**. Hasil uji t menyatakan bahwa tingkat signifikansi variabel efektivitas pendapatan memiliki nilai sebesar 0,455 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri dan Khotimah (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, dan sejalan dengan penelitian Wibowo (2019) menunjukkan bahwa variabel efektivitas pendapatan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK.

Pengujian hipotesis ketiga yang menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini mengacu pada hasil uji t yang menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh dan memiliki arah negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil uji t menyatakan bahwa tingkat signifikansi variabel pertumbuhan pendapatan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai koefisien -0,057056.

Pengujian hipotesis keempat yang menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hal ini mengacu pada hasil uji t yang menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil uji t menyatakan bahwa

tingkat signifikansi variabel pertumbuhan belanja sebesar 0,951 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui variabel solvabilitas apakah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021. Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa variabel solvabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar 0,060. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang sebesar 0,05.

Variabel solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan jika tinggi rendahnya tingkat solvabilitas pemerintah pusat pada tahun 2017-2021 tidak mempengaruhi penilaian auditor dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan pemerintah pusat atau dengan maksud lain tinggi rendahnya tingkat solvabilitas pemerintah pusat tidak mempengaruhi nilai kewajaran laporan keuangan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan terhadap masyarakat. Kementerian juga tidak memiliki hutang jangka panjang sehingga tidak beresiko atas ketidakmampuan kementerian dalam membayar kewajiban jangka panjang dengan aset yang ada.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua untuk mengetahui apakah variabel efektivitas pendapatan berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa variabel efektivitas pendapatan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar 0,455 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Variabel efektivitas pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan jika tinggi rendahnya tingkat efektivitas pendapatan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021 tidak mempengaruhi penilaian auditor dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan pemerintah atau dengan maksud lain tinggi rendahnya tingkat efektivitas pendapatan pemerintah pusat tidak mempengaruhi nilai kewajaran laporan keuangan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan terhadap masyarakat. Selain itu, tidak semua kementerian menganggarkan pada pendapatan yang berasal dari APBN.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan pendapatan berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan pendapatan berpengaruh dan menunjukkan kearah negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi ($P > |t|$) sebesar 0,004 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Variabel pertumbuhan pendapatan menunjukkan arah negatif menjelaskan bahwa jika variabel pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan maka variabel akuntabilitas pelaporan keuangan mengalami penurunan. Atau dengan kata lain, variabel pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan dalam keadaan perekonomian yang negatif. Hal ini menunjukkan jika tinggi rendahnya tingkat

pertumbuhan pendapatan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021 dapat berpengaruh terhadap penilaian auditor dalam memberikan opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah pusat atau dengan maksud lain tinggi rendahnya pertumbuhan pendapatan pemerintah pusat mempengaruhi kewajaran atas laporan keuangan dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pandemi *covid-19* memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian, membuat kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara berada di bawah tekanan yang cukup tinggi. Akibatnya, perekonomian yang mengalami resesi selama pandemi mengalami pertumbuhan yang lebih rendah, baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat untuk mengetahui apakah pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2017-2021. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai ($P > |t|$) sebesar 0,951 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Variabel pertumbuhan belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan jika tinggi rendahnya pertumbuhan belanja pemerintah pusat pada tahun 2017-2021 tidak berpengaruh terhadap penilaian auditor dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan pemerintah pusat atau dengan maksud lain tinggi rendahnya pertumbuhan pendapatan pemerintah pusat tidak mempengaruhi kewajaran atas laporan keuangan dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sumber pendanaan yang terbatas diikuti dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat mengharuskan pemerintah untuk lebih cermat dan tepat dalam menggunakan sumber dayanya.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam memberikan hasil yang maksimal. Maka dari itu, keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti yang akan datang yang memiliki kemiripan topik yang sama. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Beberapa data keuangan pada kementerian kurang lengkap pada laporan keuangan yang tersedia sehingga data yang di dapat tidak sesuai dengan harapan peneliti.
2. Penelitian yang dilakukan hanya dalam lingkup Kementerian Pusat, sehingga hasil dalam penelitian ini tidak dapat menjelaskan keseluruhan populasi yang terdapat di Indonesia.

Saran

Keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya menjadikan dasar untuk memberikan saran bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian baru yang tentunya dengan penelitian yang lebih bervariasi dan inovatif sesuai dengan kondisi yang ada di masa yang akan datang. Masukan yang dapat dipertimbangkan kembali dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat saja tetapi dapat menambahkan pemerintah daerah dan lembaga BUMN lainnya.

2. Memperpanjang periode penelitian guna mendapatkan hasil atau gambaran yang lebih luas terkait topik penelitian ini.
3. Pengambilan data dari situs web resmi dapat dilakukan jauh lebih awal untuk mempersingkat dan mempermudah dalam pengerjaan penelitian.
4. Menambahkan variabel independen lainnya berupa likuiditas dan efisiensi belanja yang dapat memengaruhi variabel akuntabilitas pelaporan keuangan yang dapat mendukung kinerja keuangan pemerintah.

REFERENSI

- Akbar, B., & Ahmad, D. (2015). Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi pada Kabupaten Bandung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* (Vol. 1, No.1, Juli 2015: 1-19)
- Andayani & Azizah. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (Vol. 11. No. 10, Oktober 2022)
- Badan Pemeriksa Keuangan, (2022), *Laporan BPK-RI pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)*, Jakarta
- Belinda, A. P & Costari. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* (Vol. 1, Issue 1)
- Fitri, M., & Husnul, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Keuangan dan Bisnis* (Vol. 10, No. 1, Januari 2022, Hlm.1-12)
- Gio, P. U., & Caraka. (2018). *Pedoman Dasar Mengolah Data dengan Program Aplikasi Statistika STATCAL*. Medan: USU press
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). n.d. "Financial Reporting Objectives", <https://gars.gasb.org/>. diakses juni 2024
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* (Vol. 12, No. 2, Tahun 2021)
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Badan Penerbit ANDI
- Retnowati, S. (2020). Refocusing Anggaran, Peran Penting K/L dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada bulan
- Soemarso, S. R. (2018). *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat
- Wibowo, S. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Pemberian Opini atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus pada Kementerian di Indonesia). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* (Vol. 5 No. 1, Juni)